

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah sebuah proses menciptakan kemakmuran masyarakat. Secara esensial, pembangunan mencerminkan usaha manusia dalam menggeser kondisi keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap belum memadai menuju tingkat kualitas baru yang lebih baik dan berkelanjutan (Lestari et al., 2021). Pembangunan ekonomi adalah upaya oleh suatu bangsa dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya memiliki tujuan dalam mencapai peningkatan pendapatan nasional, akan tetapi juga produktivitas secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dua konsep yang memiliki keterkaitan. Pembangunan ekonomi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi menjadi penunjang keberlangsungan pembangunan. Besaran pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki, mencakup sumber daya fisik seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2006).

Keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar dampak pembangunan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi juga memiliki tujuan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memperluas peluang kerja (Pangastuti, 2015). Apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja maka akan menimbulkan gap yang disebut pengangguran.

Menurut Mantra (2009), pengangguran adalah suatu keadaan seseorang dari angkatan kerja yang berkeinginan untuk bekerja dan belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi serta berdampak pada berbagai faktor yang terintegrasi pada pola-pola yang tidak sepenuhnya dapat dimengerti. Adanya pengangguran berdampak terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial sehingga memicu ketidakstabilan politik dan sosial (Rahmalia et al., 2019).

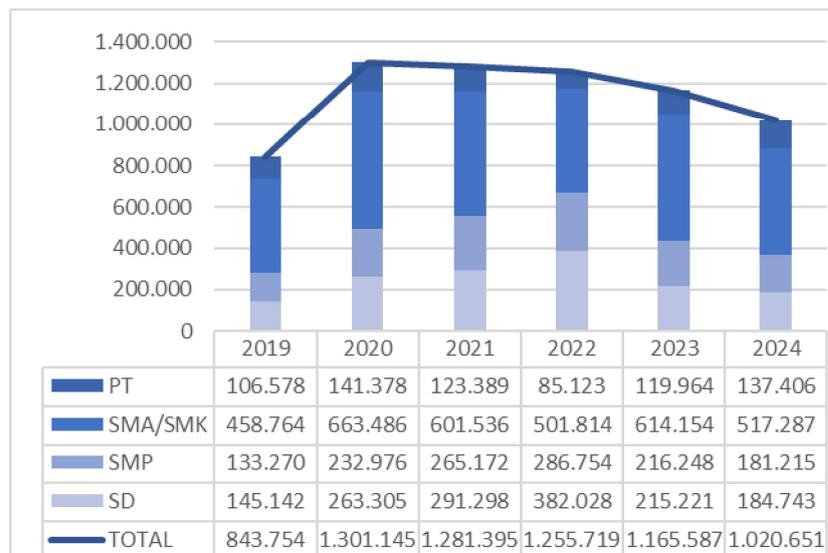
Isu pengangguran masih kerap menjadi permasalahan bagi setiap negara, khususnya negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini mencapai 152,11 juta jiwa, dengan 144,64 juta orang telah bekerja dan 7,47 juta lainnya berada dalam status pengangguran. Tenaga kerja yang belum terserap atau mereka yang masih menjadi pencari kerja akan menghambat proses pembangunan (Suhandi et al., 2021).

Bentuk pengangguran yang menjadi perhatian adalah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik adalah suatu kondisi ketika tenaga kerja dengan pendidikan tinggi mengalami hambatan dalam proses mencari pekerjaan (Rahmalia et al., 2019). Mankiw mendefinisikan pengangguran terdidik sebagai individu yang berstatus sedang dalam pencarian kerja atau belum bekerja, akan tetapi berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SMA atau sederajat (Neti & Sari, 2024).

Pengangguran terdidik terjadi karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan para pencari kerja di pasar tenaga. Pada umumnya, lulusan berpendidikan rendah cenderung bekerja di sektor informal atau menjalankan usaha sendiri, sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi lebih banyak bekerja di sektor publik atau perusahaan swasta formal. Pekerja dengan pendidikan dasar lebih sering

terlibat dalam pekerjaan yang bersifat bertahan hidup dan berproduktivitas rendah (Girsberger & Meango, 2022).

Masalah pengangguran terdidik bukan hanya persoalan yang terjadi di tingkat nasional, namun turut menjadi tantangan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi d termasuk sebagai provinsi dengan populasi dan jumlah lulusan pendidikan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terdidik yang berada di Jawa Timur tercatat cukup tinggi. Setiap tahunnya, pengangguran terdidik cenderung mendominasi struktur pengangguran di Jawa Timur, yang mana hal ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

**Gambar 1. 1 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Juta Jiwa)**

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwasanya tren pengangguran di Provinsi Jawa Timur menurut tingkat pendidikan selama periode 2019–2024 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran tercatat berada pada titik terendah, yaitu sebesar 843.754 jiwa, sebelum mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020. Lonjakan ini terjadi akibat kondisi pandemi yang menyebabkan

diterapkannya pembatasan aktivitas masyarakat. Pembatasan tersebut berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran (Indayani & Hartono, 2020).

Selama periode tersebut, tingkat pengangguran paling banyak didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2020, yakni mencapai 663.486 jiwa. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran dari lulusan SD, SMP, dan SMA menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan angka pengangguran, yang pada tahun 2024 tercatat mencapai 137.406 jiwa.

Dominasi jumlah pengangguran dari kalangan lulusan SMA ke atas berkaitan dengan kebijakan wajib belajar 9 tahun yang tertuang dalam Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008. Kebijakan ini secara bertahap menurunkan jumlah angkatan kerja dari lulusan SD dan SMP. Namun, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sejalan dengan tingkat pendidikan, menyebabkan lulusan SMA dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendominasi tingkat pengangguran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Namun, penciptaan lapangan kerja yang sesuai kualifikasi tenaga kerja terdidik masih terbatas. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji kembali efektivitas pembangunan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik.

Dampaknya, pekerja yang memiliki pendidikan dengan jenjang lebih tinggi

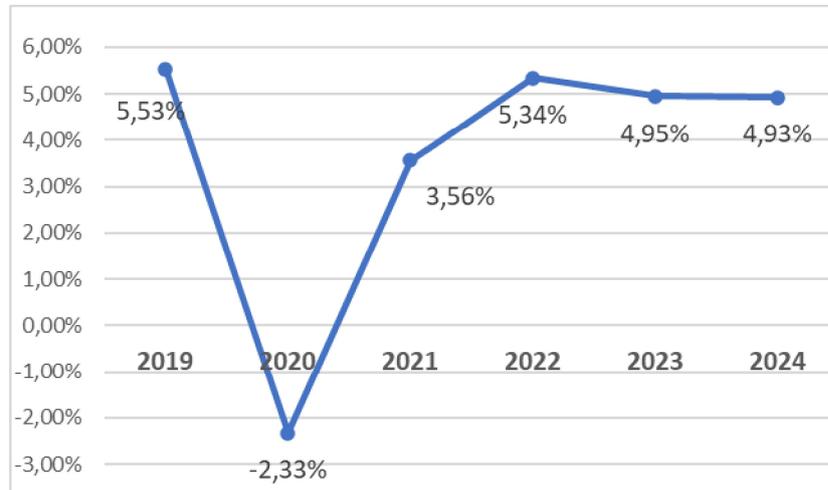
cenderung bekerja di sektor yang bertentangan atau tidak sejalan dengan kualifikasi atau kompetensi yang dimilikinya. Kesenjangan antara tingkat pendidikan dan peluang kerja mencerminkan kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja terdidik oleh sektor yang relevan (Blaug, 1984). Kondisi ini dapat menghambat efektivitas alokasi sumber daya manusia dan menurunkan tingkat pengembalian investasi pemerintah di sektor pendidikan yang seharusnya ditujukan pada peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja nasional (Somers et al., 2019).

Upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terdidik, perlu mempertimbangkan berbagai faktor dari sisi permintaan maupun penawaran di pasar tenaga kerja. Salah satu yang menjadi indikator ekonomi dapat mempengaruhi masalah pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah peningkatan dari pendapatan nasional atau bertambahnya output yang dihasilkan dari barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun (Noviatamara et al., 2019).

Berdasarkan teori, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memiliki korelasi negatif, yang berarti apabila terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, maka dapat menurunkan tingkat pengangguran (Marliana, 2022). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah umumnya diukur melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Sebuah negara dapat dinyatakan mengalami pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari PDB atau pendapatan nasional riil yang meningkat dari periode sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya penambahan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB menjadi salah satu indikator makroekonomi yang mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja baru, memperluas kapasitas produksi, dan pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja (Utami, 2020).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

### **Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Persen)**

Grafik 1.2 memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2024 yang fluktuasi. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar -2,33% sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan aktivitas ekonomi. Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,56%. Kemudian meningkat pada tahun 2022, mencapai tingkat tertinggi sebesar 5,34%. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi sedikit perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,95% dan 4,93%, capaian tersebut tetap mencerminkan kestabilan dan perbaikan kondisi ekonomi.

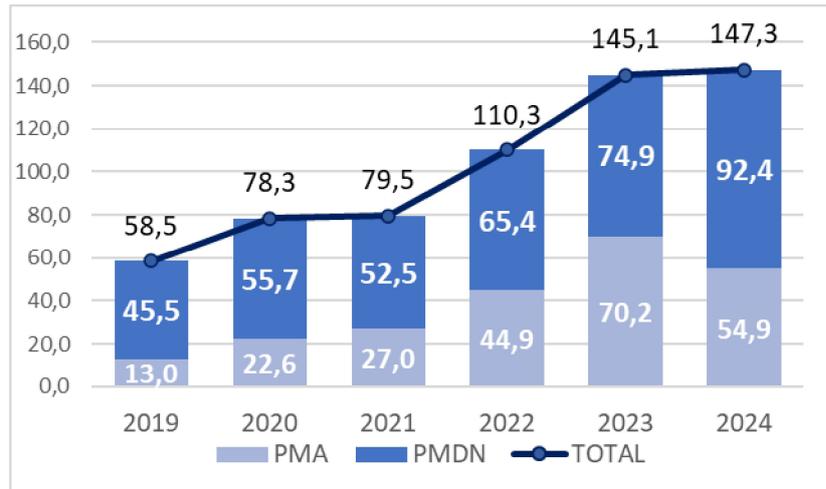
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 ditopang kinerja positif dari sejumlah sektor utama. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan yang mencapai 7,83 persen, hal ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas konsumsi

masyarakat pasca pandemi. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 8,70 persen, seiring dengan percepatan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap layanan komunikasi. Selain itu, sektor Pengadaan Listrik dan Gas turut memberikan kontribusi yang berarti dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,82 persen.

Investasi juga memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja. Investasi memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat pengangguran karena dapat mendorong peningkatan permintaan (Saragih et al., 2021). Investasi dapat dipahami sebagai penambahan faktor produksi dalam bentuk modal yang berfungsi untuk mendorong peningkatan aktivitas produksi (Marselina, 2016).

Melalui investasi, sektor-sektor ekonomi memperoleh suntikan modal dalam bentuk pengadaan alat produksi, pembangunan infrastruktur, maupun ekspansi usaha lainnya. Seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi, kebutuhan terhadap tenaga kerja akan meningkat karena skala usaha yang semakin luas. Hal ini menciptakan dorongan positif terhadap permintaan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran.

Peningkatan investasi menjadi upaya dalam menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan. Investasi domestik maupun asing dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan memperbesar peluang kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. Kebijakan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif diperlukan guna menurunkan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Sirait et al., 2018). Investasi berpotensi meningkatkan produktivitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.



Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, 2025

**Gambar 1.3 Investasi Provinsi Jawa Timur (Rp. Triliun)**

Dari gambar 1.2, dapat dilihat grafik Investasi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai investasi tercatat sebagai yang terendah, yakni sebesar 58,5 triliun rupiah. Seiring waktu, investasi mengalami peningkatan secara konsisten. Hingga tahun 2024, nilai investasi kumulatif mencapai 147,3 triliun rupiah.

Peningkatan kinerja investasi ditopang oleh pertumbuhan yang signifikan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tahun 2024 mengalami kenaikan yang mencapai 92,4 triliun rupiah dibanding tahun 2023. Capaian ini menandakan kepercayaan dari investor domestik yang semakin kuat terhadap iklim investasi di Jawa Timur. Namun, tren kenaikan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh Penanaman Modal Asing (PMA) yang justru mengalami penurunan cukup tajam, yaitu sebesar 21,8 triliun rupiah.

Penurunan ini disebabkan karena tahap realisasi mega proyek pertambangan PT. *Freeport* yang selama ini menjadi kontributor dominan bagi PMA Jawa Timur hampir selesai. Tanpa keberlanjutan proyek-proyek skala besar seperti ini, kontribusi investasi asing menjadi lebih rendah secara nominal. Hal ini juga

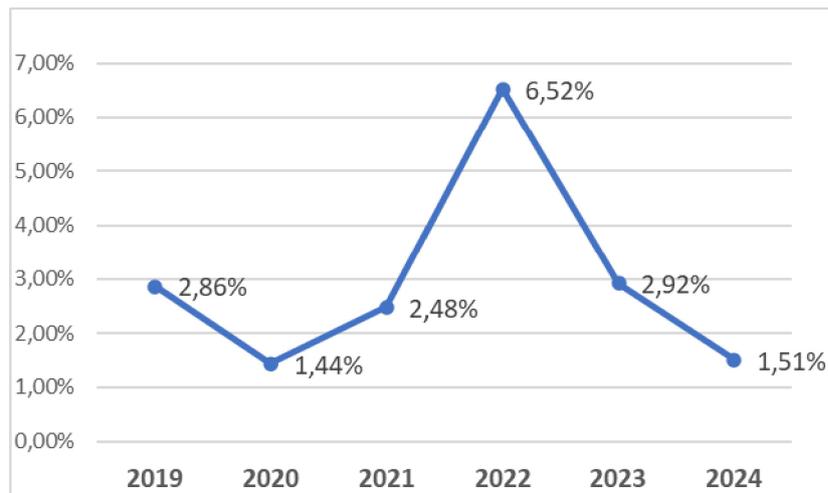
menjadi indikasi bahwa ketergantungan Jawa Timur terhadap investasi asing mulai berkurang, seiring dengan tumbuhnya kepercayaan terhadap kekuatan pasar domestik.

Persebaran investasi antar wilayah di Jawa Timur Investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas lebih baik. Sementara itu, sejumlah daerah di wilayah lain masih menunjukkan ketertinggalan dalam hal perolehan investasi. Kondisi investasi dan konsentrasi investasi yang belum merata dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong migrasi tenaga kerja ke pusat-pusat industri yang sudah padat, karena wilayah dengan investasi lebih besar cenderung memiliki lebih banyak peluang kerja (Fauziah et al., 2021) .

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran terdidik juga dipengaruhi oleh variabel makroekonomi lainnya, salah satunya inflasi. Inflasi terkait erat dengan pengangguran karena perubahan dalam permintaan agregat akan memengaruhi harga serta kesempatan kerja. Saat inflasi meningkat, kemampuan membeli dari masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penurunan pada permintaan barang dan jasa. Turunnya permintaan akan barang dan jasa ini membuat pelaku usaha melakukan pengurangan produksi yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Friedman (1977) menyatakan bahwa perubahan permintaan agregat dapat memengaruhi tingkat inflasi dan pengangguran, tergantung pada bagaimana sistem ekonomi mampu merespons dan beradaptasi terhadap kebijakan ekonomi yang berubah.

Sementara itu, berdasarkan Kurva Phillips, inflasi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran (Orji et al., 2015). Kenaikan

inflasi yang terjadi akibat permintaan agregat yang meningkat akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dalam memenuhi permintaan pasar. Perluasan kapasitas produksi tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja dapat menurunkan tingkat pengangguran.



Sumber: BPS Provinsi Jawa timur, 2025

**Gambar 1. 4 Inflasi Provinsi Jawa Timur (Persen)**

Gambar 1.4 menunjukkan fluktuasi signifikan inflasi di Jawa Timur selama 2019–2024. Inflasi terendah tercatat 1,44% pada 2020 yang kemudian mengalami peningkatan. Puncaknya pada 2022 mencapai sebesar 6,52%, yang dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti bensin, beras, dan rokok kretek filter. Komoditas tersebut memberikan tekanan inflasi merata di seluruh wilayah IHK Jawa Timur. Harga telur ayam ras juga berkontribusi signifikan, meski dampaknya berbeda antar daerah, dengan Kota Jember dan Malang mengalami pengaruh lebih rendah.

Tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2023 dan mencapai 1,51% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan stabilitas harga yang relatif baik dan sejalan dengan target inflasi nasional. Inflasi tahunan ini didorong oleh kenaikan

harga pada kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, dan tembakau yang meningkat sebesar 1,97%, serta pada kelompok sandang dan alas kaki yang meningkat sebesar 1,43%. Beberapa komoditas seperti emas perhiasan, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, dan beras menjadi kontributor utama inflasi di tahun tersebut.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa inflasi di Jawa Timur mengalami tekanan terutama dari faktor kenaikan harga komoditas penting yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Namun, pada 2024, stabilitas inflasi mengindikasikan adanya pengendalian harga yang efektif serta penyesuaian kebijakan yang mampu meredam gejolak harga dan menjaga kestabilan ekonomi regional.

Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional berkat populasi yang besar dan kekayaan sumber daya. Namun, meningkatnya akses pendidikan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang relevan dengan kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Pada akhirnya, pengangguran terdidik cenderung mendominasi struktur pengangguran

Berdasarkan uraian, pertumbuhan ekonomi dan investasi diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal, namun demikian pengaruh kedua variabel tersebut turut dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi. Inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, iklim investasi, serta dinamika sektor riil yang pada akhirnya berdampak pada permintaan tenaga kerja.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada

pengaruh langsung antara pertumbuhan ekonomi atau investasi terhadap pengangguran. Sementara itu, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan peran inflasi sebagai variabel moderasi, khususnya dalam konteks pengangguran terdidik. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis bermaksud mengkaji pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik, dengan peran inflasi sebagai variabel moderasi guna memberikan pendekatan yang lebih komprehensif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur dengan inflasi sebagai variabel moderasi ?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur dengan inflasi sebagai variabel moderasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan inflasi sebagai variabel moderasi.
4. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan inflasi sebagai variabel moderasi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini memiliki batasan yang dirancang untuk memastikan fokus kajian sejalan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran terdidik, dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Objek penelitian difokuskan pada Provinsi Jawa Timur, menggunakan data *time series* selama periode 2007 hingga 2024. Penentuan periode ini bertujuan untuk mencerminkan dinamika ekonomi regional dalam jangka waktu yang memadai sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang relevan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan wilayah. Hasil dari penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam kegiatan akademik di lingkungan universitas.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan

dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya yang berfokus pada penanggulangan pengangguran terdidik. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dalam pengembangan kajian serupa, terutama yang berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran terdidik, dan peran inflasi sebagai variabel moderasi.